

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. “Menurut Rochjadi, desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengelola pembangunan untuk mendorong perekonomian daerah maupun nasional”.¹ Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi fiskal adalah mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan potensi penerimaan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat diketahui dari penerimaan PAD terhadap Total Pengeluaran Daerah (TPD),

¹ Budi Saputra, “Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Eonomi Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jambi”, Jurnal Eko-Regional Vol.10 No.2 (September 2015) Prodi IE FEB Universitas Jambi, h. 145.

jika jumlah PAD suatu daerah meningkat maka kemandiriannya juga meningkat.

Dengan terciptanya kemandirian keuangan daerah maka pemerintah akan mampu membiayai pembangunan daerahnya. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal ini sangat menentukan kemandirian keuangan daerah.² Penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013-2017
(Ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Pandeglang	80,584,075	140,046,902	163,921,273	198,750,877	387,100,585
Kab Lebak	136,584,145	244,448,054	301,542,032	304,485,932	467,474,538
Kab Tangerang	1,218,576,390	1,576,315,878	1,851,195,177	2,054,715,996	2,786,647,280
Kab Serang	417,677,400	464,326,280	579,605,447	590,865,666	815,399,914

² Firda Rizky Amalia, dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja, "Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia", E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.3 No.6 (6 Juni 2014), Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Undayana, h.258.

Kota Tangerang	815,733,560	1,258,738,854	1,471,944,384	1,590,080,330	1,991,898,969
Kota Cilegon	291,943,585	467,950,300	579,585,575	567,671,194	652,084,326
Kota Serang	65,376,087	97,827,597	111,062,807	126,900,900	232,458,208
Kota Tangerang Selatan	728,965,301	1,023,817,429	1,228,393,890	1,346,240,156	1,622,004,639
Provinsi Banten	3,755,036,546	5,273,471,295	6,287,250,584	12,242,867,786	14,711,439,835

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Berdasarkan pada tabel PAD menunjukkan secara umum bahwa terjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Banten periode 2013-2017. Namun, jika dilihat dari kabupaten/kota, terdapat ketimpangan pendapatan kota Cilegon dengan lainnya. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan.

Kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia yang dapat tercapai jika pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian

yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masyarakat atau Negara adalah akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal dan sumber daya manusia (*human resources*), di samping pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.³ Peningkatan produktivitas, akan menyerap tenaga kerja sehingga tenaga kerja memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi berikutnya. Peran pemerintah sebagai penyusun kebijakan sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Produk Domestik Regional Bruto selama ini digunakan sebagai ukuran penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi era otonomi daerah. Wilayah dengan PDRB tinggi,

³ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: ALFABETA, 2016), h. 87.

belum tentu memiliki IPM yang tinggi pula sebaliknya wilayah dengan tingkat IPM rendah belum tentu tingkat PDRB daerah tersebut juga rendah.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013-2017
(Dalam Persen)

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kabupaten/Kota				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Pandeglang	4,92	5,01	5,97	5,52	6,05
Kab Lebak	6,27	6,04	5,93	5,87	6,05
Kab Tangerang	6,89	5,76	5,39	5,36	5,84
Kab Serang	6,33	5,99	5,14	5,10	5,21
Kota Tangerang	6,73	5,64	5,58	5,31	5,91
Kota Cilegon	6,81	4,93	4,81	5,05	5,59
Kota Serang	7,39	7,07	6,43	6,28	6,41
Kota Tangerang Selatan	8,86	8,50	7,25	6,85	7,43
Provinsi Banten	7,13	5,47	5,37	5,28	5,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Banten rata-rata tumbuh positif, dengan laju pertumbuhan ekonomi adalah Kota Tangerang Selatan dengan laju pertumbuhan sebesar 7,43%, dan pertumbuhan terendah di Kabupaten Serang dengan laju pertumbuhan sebesar 5,21% pada tahun 2017. Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten Kabupaten/Kota pertumbuhannya belum merata. Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang bagus, tetapi tidak berarti pertumbuhan yang tinggi sudah cukup. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dinilai tidak bagus apabila hanya segelintir orang yang menikmati. Dan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yaitu pemerataan hasil ekonomi.⁴

Provinsi Banten dengan perbedaan pola dan struktur daerah perekonomian yang terdapat pada masing-masing daerah menjadi sumber ketimpangan yang juga berdampak terhadap indeks pembangunan manusia yang masih belum

⁴ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Serang: LP2M IAIN SMH Banten, 2013), h. 21.

merata untuk semua daerah. Perubahan paradigma sebagai langkah dalam meningkatkan pembangunan manusia, pembangunan dilakukan dengan pendekatan ekonomi yang bersifat humanis dengan menjadikan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan tidak sebagai alat pembangunan.

Tabel 1.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Periode 2013-
2017 (Persen)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Pandeglang	61.35	62.06	62.72	63.4	63.82
Kab Lebak	61.13	61.64	62.03	62.78	62.95
Kab Tangerang	69.28	69.57	70.05	70.44	70.97
Kab Serang	63.57	63.97	64.61	65.12	65.6
Kota Tangerang	75.04	75.87	76.08	76.81	77.01
Kota Cilegon	70.99	71.57	71.81	72.04	72.29
Kota Serang	69.69	70.26	70.51	71.09	71.31
Kota Tangerang Selatan	78.65	79.17	79.38	80.11	80.84
Provinsi Banten	69.47	69.89	70.27	70.96	71.42

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Pada tabel Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten periode 2013-2017 setiap Kabupaten/Kota mengalami peningkatan, yang artinya tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dalam hal kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Namun kenyataanya Indeks Pembangunan Manusia antara Kabupaten/Kota satu dengan daerah lainnya masih terdapat ketimpangan. Tiga daerah yang tertinggal yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Dapat dikatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten belum merata pada setiap daerah. Sehingga dalam perkembangannya akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di Provinsi Banten.

Tabel 1.4
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia

Provinsi / Kabupaten / Kota	Peringkat Indeks Pembangunan Manusia				
	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	11	11	11	11	11
Sumatera Utara	10	10	12	12	12
Sumatera Barat	9	9	9	9	9
Riau	6	6	6	6	6
Jambi	17	17	16	17	17
Sumatera Selatan	23	23	23	23	23
Bengkulu	20	20	18	18	18
Lampung	26	26	24	24	24

Kep. Bangka Belitung	16	16	16	16	16
Kep. Riau	4	4	4	4	4
Dki Jakarta	1	1	1	1	1
Jawa Barat	12	12	10	10	10
Jawa Tengah	13	13	13	13	13
Di Yogyakarta	2	2	2	2	2
Jawa Timur	18	18	15	15	15
Banten	8	8	8	8	8
Bali	5	5	5	5	5
Nusa Tenggara Barat	30	30	29	29	29
Nusa Tenggara Timur	31	31	32	32	32
Kalimantan Barat	29	29	30	30	30
Kalimantan Tengah	21	21	21	21	21
Kalimantan Selatan	22	22	22	22	22
Kalimantan Timur	3	3	3	3	3
Kalimantan Utara	14	14	20	20	20
Sulawesi Utara	7	7	7	7	7
Sulawesi Tengah	25	25	26	25	25
Sulawesi Selatan	15	15	14	14	14
Sulawesi Tenggara	19	19	19	19	19
Gorontalo	28	28	28	28	28
Sulawesi Barat	32	32	31	31	31
Maluku	24	24	25	26	26
Maluku Utara	27	27	27	27	27
Papua Barat	33	33	33	33	33
Papua	34	34	34	34	34

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Provinsi Banten berada pada peringkat ke 8 dengan tingkat indeks pembangunan manusia pada tahun 2013 sebesar 69,47 %, tahun 2014 sebesar 69,89 %, tahun 2015 sebesar 70,27 %, tahun 2016 sebesar 70,96 % dan tahun 2017 sebesar 71,42 %.

Peringkat pertama capain IPM ditempati oleh Provinsi DKI

Jakarta dan Provinsi Papua berada urutan terakhir yaitu ke 34. Provinsi DKI Jakarta tercatat mulai memasuki status pembangunan manusia “sangat tinggi”. Sementara itu, tujuh Provinsi tercatat mulai memasuki status pembangunan manusia “tinggi” yaitu Provinsi Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara. Dengan demikian terdapat 21 Provinsi yang telah menyanggah status pembangunan manusia “tinggi”. Sementara itu 12 Provinsi di Indonesia berstatus “sedang”. Provinsi yang berada pada level “rendah” sudah tidak ada lagi dengan berubahnya status Provinsi Papua dari “rendah” ke “sedang”.⁵

Indeks Pembangunan Manusia diklasifikasikan oleh lembaga UNDP (*United Nation Development Program*) sebagai “suatu proses untuk memperluas berbagai macam pilihan bagi penduduk”. Dengan demikian, IPM merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia. *United Nation Development Program*

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS – Statistics Indonesia)

(UNDP) telah menerbitkan laporan pembangunan sumber daya insani dalam satuan kuantitas yang disebut dengan *Human Development Indeks* (HDI). Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu Negara atau wilayah kedalam tiga golongan, yaitu:

1. $IPM < 50$ (rendah)
2. $50 \leq IPM < 80$ (sedang/menengah)
3. $IPM > 80$ (tinggi)

Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen, yaitu:

1. Panjang umur dan sehat

Dimana kesehatan dianggap penting dan merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional. Kesehatan juga dipengaruhi oleh faktor diantaranya: lingkungan, perilaku sehat, serta pelayanan kesehatan yang baik.

2. Berpendidikan atau berpengetahuan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini, pendidikan mendukung pertumbuhan ekonomi.

3. Standar hidup yang layak

Pengeluaran perkapita riil merupakan suatu ukuran pendapatan yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Variabel ini digunakan untuk mengukur kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi secara luas (daya beli).

Pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan menjadi suatu kebutuhan. Kualitas manusia di suatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan di wilayahnya. Paradigma pembangunan menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan

derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan peningkatan pendidikan⁶.

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa penurunan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi tidak selalu diiringi oleh penurunan persentase IPM. Contoh kasus pada tahun 2016 jumlah PAD di kota Cilegon mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 579,585,575 menjadi 567,671,194, hal tersebut tidak memengaruhi persentase IPM karena pada periode yang sama IPM justru meningkat. Contoh kasus lainnya yakni pada tahun 2014 sampai dengan 2016 terjadi penurunan persentase pertumbuhan ekonomi di Kab. Tangerang, Kab. Serang, Kota Tangerang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan, untuk lebih jelasnya dapat disimak data pertumbuhan ekonomi kelima Kabupaten dan Kota tersebut:

⁶ Firda Rizky Amalia, dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja, "Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia", E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.3 No.6 (6 Juni 2014), Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Undayana, h. 257.

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi		
	2014	2015	2016
Kab Tangerang	5,76	5,39	5,36
Kab Serang	5,99	5,14	5,10
Kota Tangerang	5,64	5,58	5,31
Kota Serang	7,07	6,43	6,28
Kota Tangerang Selatan	8,50	7,25	6,85

Terlihat jelas penurunan persentase pertumbuhan ekonomi yang terjadi di lima Kabupaten/Kota pada periode tersebut, namun hal tersebut justru tidak mempengaruhi IPM. Karena pada periode yang sama persentase IPM di kelima Kabupaten dan Kota yang telah disebutkan di atas justru mengalami peningkatan. Berikut datanya:

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016
Kab Tangerang	69.57	70.05	70.44
Kab Serang	63.97	64.61	65.12
Kota Tangerang	75.87	76.08	76.81
Kota Serang	70.26	70.51	71.09
Kota Tangerang Selatan	79.17	79.38	80.11

Yang terjadi pada kenyataannya justru IPM mengalami penurunan pada tahun 2017 tepatnya di Kab. Serang sedangkan Jumlah PAD dan persentase pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan.

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa teori yang menyatakan perihal perbandingan lurus antara PAD dan Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM kenyataannya tidak menunjukkan bukti yang realistis pada prakteknya. Maka dari itu, masalah yang ditemukan peneliti terkait ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan yang ada ialah, apakah benar PAD dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap IPM? Karena jika di perhatikan secara saksama, data yang telah diuraikan di atas tidak begitu menunjukkan kebenaran atas teori mengenai perbandingan lurus antara PAD dan Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM.

Berdasarkan latar belakang di atas, dengan Kemandirian Keuangan Daerah yang dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten yang cenderung

mengalami peningkatan, pertumbuhan ekonomi yang sifatnya fluktuatif, dan Indeks Pembangunan Manusia yang mengalami peningkatan. Penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul ***“Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Banten Pada Tahun 2013-2017”***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Potensi daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah belum dikelola dengan baik.
2. Pendapatan pada daerah yang masih tertinggal tidak merata dan terjadi ketimpangan.
3. Indeks Pembangunan Manusia belum merata pada setiap daerah.

4. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dinilai tidak bagus bila hanya segelintir orang yang menikmati dengan kata lain ketidakmerataan hasil ekonomi.
5. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah tertinggal.

C. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Banten, Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun serta kemandirian keuangan daerah berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2013-2017?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2013-2017?
3. Bagaimana pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2013-2017?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2013-2017
2. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2013-2017

3. Untuk menganalisis pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten Tahun 2013-2017

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan suatu pembelajaran untuk menggali pemahaman peneliti sehingga dapat meningkatkan wawasan keilmuan dan pengetahuan mengenai pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan informasi yang relevan serta bermanfaat bagi peneliti lain di bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam meningkatkan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi provinsi banten. Selain itu penulis berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan ilmu ekonomi khususnya mengenai pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi bagi pembaca.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif kualitatif, diagram atau bahkan gabungan keduanya.

Menurut BKKNB Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator komposit tunggal yang digunakan untuk

mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang sudah dilakukan suatu Negara (wilayah).

Indeks pembangunan manusia tidak lepas kaitannya dengan seberapa tetapkah pendapatan yang dikelola dan pertumbuhan ekonomi untuk membangun sumber daya manusia yang produktif. Yang mana, produktivitas selalu bergandengan dengan tingkat perolehan pendapatan. Sehingga, dengan tingkat pendapatan yang diperoleh bisa menekan jumlah penduduk miskin daerah tersebut. Indeks pembangunan manusia juga merupakan dampak dari adanya ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Kemandirian keuangan daerah dapat diketahui dari penerimaan PAD terhadap Total Pengeluaran Daerah (TPD), jika jumlah PAD suatu daerah meningkat maka

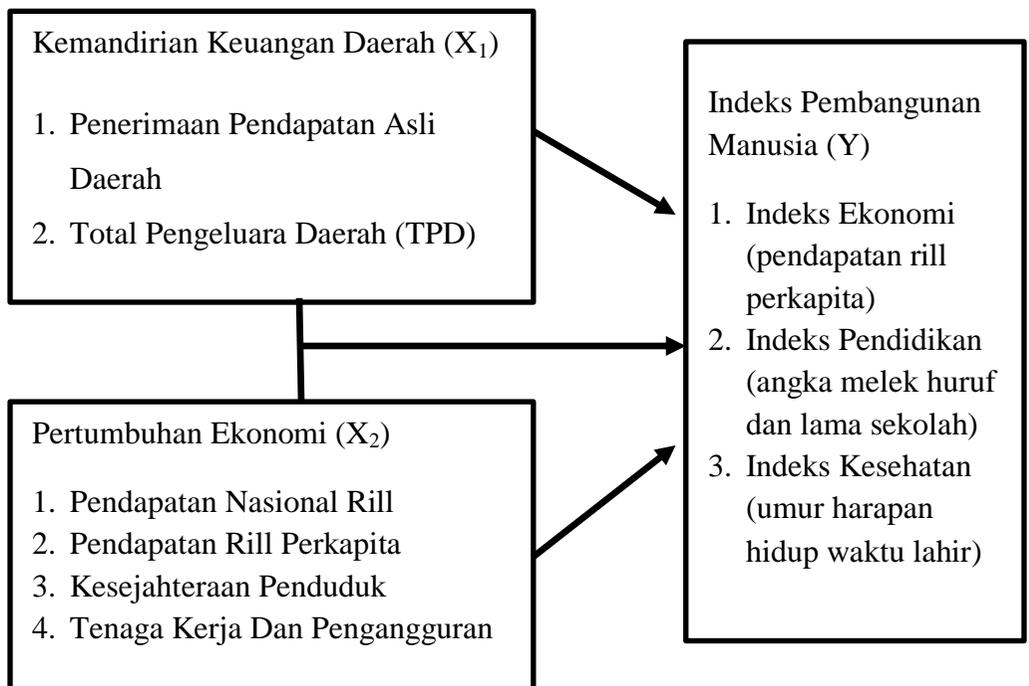
kemandiriannya juga meningkat. Pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana atau modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut terhadap barang-barang publik dan jasa pelayanannya. Semakin besar kemandirian keuangan daerah, maka semakin mandiri pula suatu daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal, teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat

perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.⁷

Berdasarkan tinjauan landasan teori, maka dapat diperoleh suatu susunan kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 34.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab yaitu bab I. Pendahuluan, bab II. Landasan Teori, bab III. Metode Penelitian, bab IV. Pembahasan hasil penulisan, dan bab V. Kesimpulan dan Saran. Untuk masing-masing isi setiap bagian adalah sebagai berikut:

BAB Ke-Satu : Pendahuluan bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah

BAB Ke-Dua : Landasan Teori bab ini berisi tentang pembahasan teori-teori dan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu kemandirian keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia.

BAB Ke-Tiga : Metode Penelitian bab ini berisikan Metodologi Penelitian menguraikan secara rinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan

BAB Ke-Empat : Pembahasan Hasil Penelitian bab ini membahas tentang uraian penelitian berupa temuan-

temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasan yang terpadu.

BAB Ke-Lima : Kesimpulan dan Saran bab ini membahas tentang kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil analisa Sdata dan meberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait.